



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

4. Peraturan Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dana Alokasi Umum terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah secara proporsional.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks produk domestik regional bruto per kapita.

(2) Kapasitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Pasal 4

- (1) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten/kota.
- (2) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13 (ketiga belas), dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 5

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk daerah otonom baru dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk, dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp341.219.325.651.000,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Rincian alokasi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- (4) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2014 disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Pemeriksaan dan/atau pengawasan intern atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdianti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 Januari 2014

**RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Aceh	1.201.612.787.000
2	Kab. Aceh Barat	550.414.472.000
3	Kab. Aceh Besar	673.776.666.000
4	Kab. Aceh Selatan	582.668.161.000
5	Kab. Aceh Singkil	380.851.529.000
6	Kab. Aceh Tengah	564.691.527.000
7	Kab. Aceh Tenggara	520.394.600.000
8	Kab. Aceh Timur	703.898.153.000
9	Kab. Aceh Utara	755.061.139.000
10	Kab. Bireuen	770.780.301.000
11	Kab. Pidie	746.937.953.000
12	Kab. Simeulue	378.859.516.000
13	Kota Banda Aceh	610.554.730.000
14	Kota Sabang	324.038.882.000
15	Kota Langsa	419.767.005.000
16	Kota Lhokseumawe	469.956.588.000
17	Kab. Nagan Raya	500.941.291.000
18	Kab. Aceh Jaya	382.101.138.000
19	Kab. Aceh Barat Daya	406.138.315.000
20	Kab. Gayo Lues	403.096.648.000
21	Kab. Aceh Tamiang	467.034.124.000
22	Kab. Bener Meriah	410.897.128.000
23	Kota Subulussalam	278.513.125.000

24 Kab. Pidie ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	DAERAH	JUMLAH
24	Kab. Pidie Jaya	391.789.535.000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.349.132.276.000
26	Kab. Asahan	795.350.930.000
27	Kab. Dairi	532.723.259.000
28	Kab. Deli Serdang	1.363.811.250.000
29	Kab. Karo	686.834.562.000
30	Kab. Labuhanbatu	561.476.208.000
31	Kab. Langkat	1.039.650.946.000
32	Kab. Mandailing Natal	692.133.576.000
33	Kab. Nias	347.698.829.000
34	Kab. Simalungun	1.077.985.764.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	573.244.182.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	541.491.907.000
37	Kab. Tapanuli Utara	596.841.256.000
38	Kab. Toba Samosir	495.377.257.000
39	Kota Binjai	526.069.678.000
40	Kota Medan	1.393.504.580.000
41	Kota Pematangsiantar	519.435.661.000
42	Kota Sibolga	371.812.825.000
43	Kota Tanjung Balai	387.259.055.000
44	Kota Tebing Tinggi	385.030.433.000
45	Kota Padang Sidempuan	470.353.368.000
46	Kab. Pakpak Bharat	313.591.345.000
47	Kab. Nias Selatan	455.533.985.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	487.059.684.000
49	Kab. Serdang Bedagai	698.412.747.000
50	Kab. Samosir	441.619.455.000
51	Kab. Batubara	591.720.062.000

52 Kab. Padang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	DAERAH	JUMLAH
52	Kab. Padang Lawas	408.043.834.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	418.726.923.000
54	Kab. Labuhanbatu Utara	503.053.678.000
55	Kab. Labuhanbatu Selatan	450.151.264.000
56	Kab. Nias Utara	355.354.627.000
57	Kab. Nias Barat	279.674.672.000
58	Kota Gunungsitoli	383.524.614.000
59	Provinsi Sumatera Barat	1.129.886.306.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	700.183.206.000
61	Kab. Agam	739.359.873.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	531.389.939.000
63	Kab. Padang Pariaman	683.752.765.000
64	Kab. Pasaman	542.067.878.000
65	Kab. Pesisir Selatan	753.984.939.000
66	Kab. Sijunjung	498.591.200.000
67	Kab. Solok	651.730.691.000
68	Kab. Tanah Datar	650.563.368.000
69	Kota Bukittinggi	404.285.567.000
70	Kota Padang Panjang	341.743.153.000
71	Kota Padang	1.060.917.648.000
72	Kota Payakumbuh	412.929.814.000
73	Kota Sawahlunto	336.999.766.000
74	Kota Solok	354.372.862.000
75	Kota Pariaman	386.256.228.000
76	Kab. Pasaman Barat	580.406.954.000
77	Kab. Dharmasraya	450.393.254.000
78	Kab. Solok Selatan	406.540.345.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	DAERAH	JUMLAH
79	Provinsi Riau	820.984.584.000
80	Kab. Bengkalis	85.777.928.000
81	Kab. Indragiri Hilir	847.860.750.000
82	Kab. Indragiri Hulu	631.168.431.000
83	Kab. Kampar	742.583.673.000
84	Kab. Kuantan Singingi	618.821.044.000
85	Kab. Pelalawan	536.384.455.000
86	Kab. Rokan Hilir	413.982.787.000
87	Kab. Rokan Hulu	571.522.210.000
88	Kab. Siak	276.181.935.000
89	Kota Dumai	359.840.493.000
90	Kota Pekanbaru	809.987.156.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	371.269.172.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	698.009.318.000
93	Kab. Bintan	304.974.241.000
94	Kab. Natuna	187.950.770.000
95	Kab. Karimun	324.170.518.000
96	Kota Batam	559.103.958.000
97	Kota Tanjung Pinang	360.587.451.000
98	Kab. Lingga	316.390.446.000
99	Kab. Kepulauan Anambas	215.651.064.000
100	Provinsi Jambi	948.337.712.000
101	Kab. Batanghari	527.233.482.000
102	Kab. Bungo	579.600.648.000
103	Kab. Kerinci	545.365.585.000
104	Kab. Merangin	633.657.922.000
105	Kab. Muaro Jambi	565.256.883.000
106	Kab. Sarolangun	521.591.109.000

107 Kab. Tanjung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	DAERAH	JUMLAH
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	429.955.329.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	455.996.416.000
109	Kab. Tebo	509.396.969.000
110	Kota Jambi	678.620.172.000
111	Kota Sungai Penuh	365.298.130.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	985.542.760.000
113	Kab. Lahat	615.240.306.000
114	Kab. Musi Banyuasin	411.869.675.000
115	Kab. Musi Rawas	420.562.346.000
116	Kab. Muara Enim	593.564.398.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	931.158.869.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	568.771.201.000
119	Kota Palembang	1.203.662.453.000
120	Kota Pagar Alam	354.727.429.000
121	Kota Lubuk Linggau	414.757.867.000
122	Kota Prabumulih	383.313.715.000
123	Kab. Banyuasin	824.218.824.000
124	Kab. Ogan Ilir	561.376.933.000
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	680.713.525.000
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	512.126.270.000
127	Kab. Empat Lawang	360.871.981.000
128	Kab. Musi Rawas Utara	284.408.593.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	110.386.837.000
130	Provinsi Bangka Belitung	806.820.146.000
131	Kab. Bangka	492.721.831.000
132	Kab. Belitung	428.619.259.000
133	Kota Pangkal Pinang	414.685.923.000
134	Kab. Bangka Selatan	413.170.287.000

135. Kab. Bangka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	DAERAH	JUMLAH
135	Kab. Bangka Tengah	377.712.293.000
136	Kab. Bangka Barat	413.680.194.000
137	Kab. Belitung Timur	392.975.926.000
138	Provinsi Bengkulu	955.095.187.000
139	Kab. Bengkulu Selatan	490.436.878.000
140	Kab. Bengkulu Utara	558.467.872.000
141	Kab. Rejang Lebong	541.451.989.000
142	Kota Bengkulu	602.742.391.000
143	Kab. Kaur	371.883.436.000
144	Kab. Seluma	444.698.984.000
145	Kab. Mukomuko	454.993.409.000
146	Kab. Lebong	373.700.225.000
147	Kab. Kepahiang	402.021.565.000
148	Kab. Bengkulu Tengah	379.669.582.000
149	Provinsi Lampung	1.136.053.041.000
150	Kab. Lampung Barat	388.754.357.000
151	Kab. Lampung Selatan	847.657.151.000
152	Kab. Lampung Tengah	1.177.513.282.000
153	Kab. Lampung Utara	838.661.589.000
154	Kab. Lampung Timur	940.041.243.000
155	Kab. Tanggamus	669.512.156.000
156	Kab. Tulang Bawang	533.313.684.000
157	Kab. Way Kanan	573.114.161.000
158	Kota Bandar Lampung	921.826.931.000
159	Kota Metro	414.624.161.000
160	Kab. Pesawaran	625.845.694.000
161	Kab. Pringsewu	547.622.366.000
162	Kab. Mesuji	387.694.110.000

163 Kab. Tulang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	DAERAH	JUMLAH
163	Kab. Tulang Bawang Barat	424.389.404.000
164	Kab. Pesisir Barat	227.314.157.000
165	Provinsi DKI Jakarta	85.985.282.000
166	Provinsi Jawa Barat	1.687.686.386.000
167	Kab. Bandung	1.897.769.300.000
168	Kab. Bekasi	1.195.757.868.000
169	Kab. Bogor	2.055.944.991.900
170	Kab. Ciamis	1.068.289.296.000
171	Kab. Cianjur	1.407.469.628.000
172	Kab. Cirebon	1.406.862.523.000
173	Kab. Garut	1.702.452.909.000
174	Kab. Indramayu	1.267.337.159.000
175	Kab. Karawang	1.188.478.470.000
176	Kab. Kuningan	1.112.271.883.000
177	Kab. Majalengka	1.092.495.173.000
178	Kab. Purwakarta	786.592.072.000
179	Kab. Subang	1.139.779.043.000
180	Kab. Sukabumi	1.458.379.433.000
181	Kab. Sumedang	1.104.417.363.000
182	Kab. Tasikmalaya	1.342.934.278.000
183	Kota Bandung	1.596.749.326.000
184	Kota Bekasi	1.133.417.253.000
185	Kota Bogor	732.337.058.000
186	Kota Cirebon	583.927.691.000
187	Kota Depok	838.572.784.000
188	Kota Sukabumi	484.938.664.000
189	Kota Cimahi	537.371.615.000
190	Kota Tasikmalaya	732.508.313.000

191 Kota Banjar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	DAERAH	JUMLAH
191	Kota Banjar	342.267.848.000
192	Kab. Bandung Barat	992.254.884.000
193	Kab. Pangandaran	363.882.472.000
194	Provinsi Banten	728.490.012.000
195	Kab. Lebak	1.000.878.505.000
196	Kab. Pandeglang	1.077.077.628.000
197	Kab. Serang	950.704.648.000
198	Kab. Tangerang	1.213.857.913.000
199	Kota Cilegon	490.917.599.000
200	Kota Tangerang	890.213.131.000
201	Kota Serang	564.282.698.000
202	Kota Tangerang Selatan	566.429.457.000
203	Provinsi Jawa Tengah	1.803.931.189.000
204	Kab. Banjarnegara	826.044.419.000
205	Kab. Banyumas	1.224.710.992.000
206	Kab. Batang	682.182.894.000
207	Kab. Blora	823.874.089.000
208	Kab. Boyolali	943.220.456.000
209	Kab. Brebes	1.186.969.845.000
210	Kab. Cilacap	1.291.121.704.000
211	Kab. Demak	795.874.748.000
212	Kab. Grobogan	977.675.512.000
213	Kab. Jepara	887.768.694.000
214	Kab. Karanganyar	870.001.752.000
215	Kab. Kebumen	1.125.568.884.000
216	Kab. Kendal	852.170.849.000
217	Kab. Klaten	1.142.586.588.000
218	Kab. Kudus	795.851.851.000

219 Kab. Magelang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	DAERAH	JUMLAH
219	Kab. Magelang	965.124.427.000
220	Kab. Pati	1.043.498.355.000
221	Kab. Pekalongan	831.579.000.000
222	Kab. Pemalang	1.016.813.333.000
223	Kab. Purbalingga	777.989.499.000
224	Kab. Purworejo	854.737.495.000
225	Kab. Rembang	700.774.721.000
226	Kab. Semarang	848.736.010.000
227	Kab. Sragen	946.826.641.000
228	Kab. Sukoharjo	826.891.481.000
229	Kab. Tegal	1.044.211.310.000
230	Kab. Temanggung	708.764.753.000
231	Kab. Wonogiri	1.001.378.439.000
232	Kab. Wonosobo	724.245.009.000
233	Kota Magelang	417.211.449.000
234	Kota Pekalongan	412.871.094.000
235	Kota Salatiga	399.083.343.000
236	Kota Semarang	1.104.739.473.000
237	Kota Surakarta	710.803.934.000
238	Kota Tegal	390.732.536.000
239	Provinsi DI Yogyakarta	899.923.550.000
240	Kab. Bantul	949.252.188.000
241	Kab. Gunung Kidul	847.388.294.000
242	Kab. Kulon Progo	639.409.211.000
243	Kab. Sleman	952.102.502.000
244	Kota Yogyakarta	618.742.352.000
245	Provinsi Jawa Timur	1.866.548.185.000
246	Kab. Bangkalan	854.873.885.000

247 Kab. Banyuwangi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	DAERAH	JUMLAH
247	Kab. Banyuwangi	1.254.496.229.000
248	Kab. Blitar	1.027.251.687.000
249	Kab. Bojonegoro	920.522.357.000
250	Kab. Bondowoso	826.284.368.000
251	Kab. Gresik	863.397.519.000
252	Kab. Jember	1.539.722.508.000
253	Kab. Jombang	1.007.166.193.000
254	Kab. Kediri	1.144.878.533.000
255	Kab. Lamongan	1.042.124.514.000
256	Kab. Lumajang	898.217.627.000
257	Kab. Madiun	808.842.790.000
258	Kab. Magetan	840.086.597.000
259	Kab. Malang	1.572.191.571.000
260	Kab. Mojokerto	899.109.179.000
261	Kab. Nganjuk	1.004.037.764.000
262	Kab. Ngawi	980.530.132.000
263	Kab. Pacitan	700.743.024.000
264	Kab. Pamekasan	788.617.777.000
265	Kab. Pasuruan	1.068.868.861.000
266	Kab. Ponorogo	970.788.118.000
267	Kab. Probolinggo	929.380.602.000
268	Kab. Sampang	753.954.218.000
269	Kab. Sidoarjo	1.199.036.154.000
270	Kab. Situbondo	766.542.999.000
271	Kab. Sumenep	984.839.445.000
272	Kab. Trenggalek	815.508.143.000
273	Kab. Tuban	926.685.197.000
274	Kab. Tulungagung	1.083.859.022.000

275 Kota Blitar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	DAERAH	JUMLAH
275	Kota Blitar	392.221.911.000
276	Kota Kediri	634.351.539.000
277	Kota Madiun	511.089.913.000
278	Kota Malang	808.447.825.000
279	Kota Mojokerto	380.779.789.000
280	Kota Pasuruan	391.843.124.000
281	Kota Probolinggo	454.208.196.000
282	Kota Surabaya	1.200.889.359.000
283	Kota Batu	412.378.255.000
284	Provinsi Kalimantan Barat	1.290.222.856.000
285	Kab. Bengkayang	494.245.071.000
286	Kab. Landak	589.729.984.000
287	Kab. Kapuas Hulu	873.552.160.000
288	Kab. Ketapang	1.020.384.603.000
289	Kab. Pontianak	503.427.631.000
290	Kab. Sambas	763.059.843.000
291	Kab. Sanggau	740.610.477.000
292	Kab. Sintang	820.084.062.000
293	Kota Pontianak	670.090.725.000
294	Kota Singkawang	467.557.081.000
295	Kab. Sekadau	424.128.392.000
296	Kab. Melawi	557.198.047.000
297	Kab. Kayong Utara	380.125.181.000
298	Kab. Kubu Raya	699.700.430.000
299	Provinsi Kalimantan Tengah	1.152.428.738.000
300	Kab. Barito Selatan	552.539.111.000
301	Kab. Barito Utara	514.638.471.000
302	Kab. Kapuas	798.733.269.000

303 Kab. Kotawaringin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	DAERAH	JUMLAH
303	Kab. Kotawaringin Barat	597.665.464.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	778.842.792.000
305	Kota Palangkaraya	589.449.668.000
306	Kab. Barito Timur	464.678.658.000
307	Kab. Murung Raya	585.234.541.000
308	Kab. Pulang Pisau	504.013.063.000
309	Kab. Gunung Mas	515.337.253.000
310	Kab. Lamandau	424.351.636.000
311	Kab. Sukamara	409.309.371.000
312	Kab. Katingan	645.888.942.000
313	Kab. Seruyan	545.446.415.000
314	Provinsi Kalimantan Selatan	701.725.536.000
315	Kab. Banjar	624.136.721.000
316	Kab. Barito Kuala	512.015.486.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	478.093.768.000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	485.521.139.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	451.127.460.000
320	Kab. Kotabaru	611.898.456.000
321	Kab. Tabalong	444.103.855.000
322	Kab. Tanah Laut	463.309.949.000
323	Kab. Tapin	416.564.087.000
324	Kota Banjarbaru	389.107.868.000
325	Kota Banjarmasin	678.176.089.000
326	Kab. Balangan	319.202.334.000
327	Kab. Tanah Bumbu	426.008.216.000
328	Provinsi Kalimantan Timur	57.312.515.000
329	Kab. Berau	498.008.861.000
330	Kab. Kutai Kartanegara	127.010.980.000

331 Kab. Kutai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	DAERAH	JUMLAH
331	Kab. Kutai Barat	468.645.135.000
332	Kab. Kutai Timur	565.746.999.000
333	Kab. Paser	308.251.183.000
334	Kota Balikpapan	449.982.262.000
335	Kota Bontang	153.185.776.000
336	Kota Samarinda	614.366.913.000
337	Kab. Penajam Paser Utara	188.713.598.000
338	Kab. Mahakam Ulu	141.922.703.000
339	Provinsi Kalimantan Utara	20.567.986.000
340	Kab. Bulungan	332.429.548.000
341	Kota Tarakan	249.949.676.000
342	Kab. Malinau	653.156.829.000
343	Kab. Nunukan	311.776.974.000
344	Kab. Tana Tidung	204.415.427.000
345	Provinsi Sulawesi Utara	949.852.622.000
346	Kab. Bolaang Mongondow	485.630.988.000
347	Kab. Minahasa	595.565.085.000
348	Kab. Kepulauan Sangihe	471.848.315.000
349	Kota Bitung	469.745.053.000
350	Kota Manado	729.213.779.000
351	Kab. Kepulauan Talaud	428.036.855.000
352	Kab. Minahasa Selatan	476.105.045.000
353	Kota Tomohon	376.334.135.000
354	Kab. Minahasa Utara	425.937.354.000
355	Kota Kotamobagu	340.081.903.000
356	Kab. Bolaang Mongondow Utara	326.625.009.000
357	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	340.218.976.000
358	Kab. Minahasa Tenggara	400.661.737.000

359 Kab. Bolaang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	DAERAH	JUMLAH
359	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	289.221.846.000
360	Kab. Bolaang Mongondow Timur	288.406.875.000
361	Provinsi Gorontalo	734.279.438.000
362	Kab. Boalemo	389.548.660.000
363	Kab. Gorontalo	601.207.484.000
364	Kota Gorontalo	456.331.470.000
365	Kab. Pohuwato	438.955.271.000
366	Kab. Bone Bolango	408.500.750.000
367	Kab. Gorontalo Utara	324.121.552.000
368	Provinsi Sulawesi Tengah	1.087.885.014.000
369	Kab. Banggai	794.840.029.000
370	Kab. Banggai Kepulauan	347.051.160.000
371	Kab. Buol	455.657.415.000
372	Kab. Toli-Toli	535.154.857.000
373	Kab. Donggala	573.670.222.000
374	Kab. Morowali	286.764.166.000
375	Kab. Poso	642.281.901.000
376	Kota Palu	637.378.278.000
377	Kab. Parigi Moutong	660.265.526.000
378	Kab. Tojo Una Una	482.416.599.000
379	Kab. Sigi	563.092.455.000
380	Kab. Banggai Laut	153.501.061.000
381	Kab. Morowali Utara	395.447.752.000
382	Provinsi Sulawesi Selatan	1.209.598.741.000
383	Kab. Bantaeng	424.570.861.000
384	Kab. Barru	471.135.015.000
385	Kab. Bone	950.401.934.000
386	Kab. Bulukumba	653.897.726.000

387 Kab. Enrekang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	DAERAH	JUMLAH
387	Kab. Enrekang	484.907.285.000
388	Kab. Gowa	746.700.092.000
389	Kab. Jeneponto	542.150.883.000
390	Kab. Luwu	595.699.150.000
391	Kab. Luwu Utara	573.100.112.000
392	Kab. Maros	614.598.482.000
393	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	623.418.990.000
394	Kab. Pinrang	629.285.550.000
395	Kab. Kepulauan Selayar	458.019.013.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	533.655.220.000
397	Kab. Sinjai	521.628.340.000
398	Kab. Soppeng	569.126.996.000
399	Kab. Takalar	565.195.363.000
400	Kab. Tana Toraja	486.447.423.000
401	Kab. Wajo	631.247.160.000
402	Kota Parepare	426.405.955.000
403	Kota Makassar	1.114.853.212.000
404	Kota Palopo	449.242.430.000
405	Kab. Luwu Timur	462.819.314.000
406	Kab. Toraja Utara	448.417.228.000
407	Provinsi Sulawesi Barat	776.214.122.000
408	Kab. Majene	457.679.754.000
409	Kab. Mamuju	463.324.979.000
410	Kab. Polewali Mandar	603.283.761.000
411	Kab. Mamasa	438.577.823.000
412	Kab. Mamuju Utara	383.392.281.000
413	Kab. Mamuju Tengah	176.375.604.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	DAERAH	JUMLAH
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.053.636.011.000
415	Kab. Buton	601.624.424.000
416	Kab. Konawe	584.033.036.000
417	Kab. Kolaka	454.342.506.000
418	Kab. Muna	689.447.643.000
419	Kota Kendari	611.179.529.000
420	Kota Bau-bau	465.583.877.000
421	Kab. Konawe Selatan	581.807.666.000
422	Kab. Bombana	414.006.948.000
423	Kab. Wakatobi	387.267.035.000
424	Kab. Kolaka Utara	438.746.757.000
425	Kab. Konawe Utara	441.295.580.000
426	Kab. Buton Utara	366.551.466.000
427	Kab. Konawe Kepulauan	97.698.630.000
428	Kab. Kolaka Timur	223.177.156.000
429	Provinsi Bali	832.297.473.000
430	Kab. Badung	324.815.695.000
431	Kab. Bangli	486.381.005.000
432	Kab. Buleleng	854.532.248.000
433	Kab. Gianyar	626.674.608.000
434	Kab. Jembrana	484.825.804.000
435	Kab. Karangasem	614.793.461.000
436	Kab. Klungkung	474.427.796.000
437	Kab. Tabanan	719.621.530.000
438	Kota Denpasar	615.961.906.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Barat	980.390.340.000
440	Kab. Bima	771.058.947.000
441	Kab. Dompu	521.667.743.000

442 Kab. Lombok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	DAERAH	JUMLAH
442	Kab. Lombok Barat	685.318.844.000
443	Kab. Lombok Tengah	865.423.847.000
444	Kab. Lombok Timur	1.039.124.622.000
445	Kab. Sumbawa	724.963.659.000
446	Kota Mataram	564.661.391.000
447	Kota Bima	410.483.310.000
448	Kab. Sumbawa Barat	349.283.834.000
449	Kab. Lombok Utara	339.993.327.000
450	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.131.687.590.000
451	Kab. Alor	510.220.213.000
452	Kab. Belu	349.381.471.000
453	Kab. Ende	546.281.332.000
454	Kab. Flores Timur	531.905.134.000
455	Kab. Kupang	598.332.549.000
456	Kab. Lembata	388.625.200.000
457	Kab. Manggarai	507.725.930.000
458	Kab. Ngada	410.643.171.000
459	Kab. Sikka	553.376.947.000
460	Kab. Sumba Barat	350.946.291.000
461	Kab. Sumba Timur	561.028.322.000
462	Kab. Timor Tengah Selatan	658.897.183.000
463	Kab. Timor Tengah Utara	506.713.353.000
464	Kota Kupang	598.804.801.000
465	Kab. Rote Ndao	361.623.423.000
466	Kab. Manggarai Barat	442.388.310.000
467	Kab. Nagekeo	381.411.361.000
468	Kab. Sumba Barat Daya	413.582.665.000
469	Kab. Sumba Tengah	302.033.721.000

470 Kab. Manggarai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	DAERAH	JUMLAH
470	Kab. Manggarai Timur	421.442.287.000
471	Kab. Sabu Raijua	314.254.688.000
472	Kab. Malaka	285.088.668.000
473	Provinsi Maluku	1.019.704.312.000
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	487.859.601.000
475	Kab. Maluku Tengah	848.638.632.000
476	Kab. Maluku Tenggara	399.953.093.000
477	Kab. Buru	392.051.367.000
478	Kota Ambon	601.627.489.000
479	Kab. Seram Bagian Barat	495.911.700.000
480	Kab. Seram Bagian Timur	436.637.414.000
481	Kab. Kepulauan Aru	469.996.166.000
482	Kota Tual	311.236.553.000
483	Kab. Buru Selatan	362.524.010.000
484	Kab. Maluku Barat Daya	483.431.553.000
485	Provinsi Maluku Utara	906.623.550.000
486	Kab. Halmahera Tengah	392.180.412.000
487	Kab. Halmahera Barat	410.351.504.000
488	Kota Ternate	536.443.879.000
489	Kab. Halmahera Timur	372.886.814.000
490	Kota Tidore Kepulauan	497.417.022.000
491	Kab. Kepulauan Sula	339.809.267.000
492	Kab. Halmahera Selatan	524.814.372.000
493	Kab. Halmahera Utara	422.491.517.000
494	Kab. Pulau Morotai	323.758.154.000
495	Kab. Pulau Taliabu	127.680.329.000
496	Provinsi Papua	1.991.202.341.100
497	Kab. Biak Numfor	525.097.245.000

498 Kab. Jayapura ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	DAERAH	JUMLAH
498	Kab. Jayapura	597.199.562.000
499	Kab. Jayawijaya	608.581.629.000
500	Kab. Merauke	1.161.464.820.000
501	Kab. Mimika	582.498.865.000
502	Kab. Nabire	643.898.180.000
503	Kab. Paniai	508.843.453.000
504	Kab. Puncak Jaya	632.414.392.000
505	Kab. Kepulauan Yapen	469.840.515.000
506	Kota Jayapura	624.312.379.000
507	Kab. Sarmi	667.002.043.000
508	Kab. Keerom	500.546.216.000
509	Kab. Yahukimo	606.920.946.000
510	Kab. Pegunungan Bintang	784.449.474.000
511	Kab. Tolikara	661.680.651.000
512	Kab. Boven Digoel	740.002.449.000
513	Kab. Mappi	728.591.348.000
514	Kab. Asmat	822.115.038.000
515	Kab. Waropen	467.780.810.000
516	Kab. Supiori	409.397.485.000
517	Kab. Mamberamo Raya	650.844.607.000
518	Kab. Mamberamo Tengah	554.042.420.000
519	Kab. Yalimo	567.217.623.000
520	Kab. Lanny Jaya	594.234.876.000
521	Kab. Nduga	506.372.604.000
522	Kab. Puncak	722.726.455.000
523	Kab. Dogiyai	462.108.590.000
524	Kab. Intan Jaya	636.141.574.000
525	Kab. Deiyai	405.595.790.000

526 Provinsi Papua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	DAERAH	JUMLAH
526	Provinsi Papua Barat	1.122.264.659.000
527	Kab. Sorong	473.691.257.000
528	Kab. Manokwari	426.037.888.000
529	Kab. Fak-Fak	626.893.988.000
530	Kota Sorong	420.363.515.000
531	Kab. Sorong Selatan	396.040.495.000
532	Kab. Raja Ampat	591.036.221.000
533	Kab. Teluk Bintuni	576.627.839.000
534	Kab. Teluk Wondama	373.039.643.000
535	Kab. Kaimana	561.572.509.000
536	Kab. Tambrauw	494.724.124.000
537	Kab. Maybrat	377.464.887.000
538	Kab. Manokwari Selatan	85.432.173.000
539	Kab. Pegunungan Arfak	91.403.520.000
	Total Provinsi	34.121.932.565.100
	Total Kabupaten / Kota	307.097.393.085.900
	Total Nasional	341.219.325.651.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

